



Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

20 ONESIA 2

DIGITAL ECONOMY MINISTERS' MEETING

x♦

BALI, 1 SEPTEMBER 2022

Edisi 45
September 2022



Bali Package

Kolaborasi untuk Digitalisasi Global

Dari DEWG Hingga DMM G20

Setahun Perjalanan Kominfo Mengampu Ekonomi Digital

Tidak terasa gelaran Presidensi G20 akan berakhir, yang ditandai dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang. Mengusung tema *recover together recover stronger*, Presidensi G20 Indonesia tahun ini membahas tiga isu prioritas, yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi. Dari ketiga isu tersebut, Kementerian Komunikasi dan berperan sebagai ketua *Digital Economy Working*

Group (DEWG) yang membahas secara khusus tentang transformasi digital dan ekonomi.

Ada tiga isu yang dibahas dalam DEWG, yakni Konektivitas Digital dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19, Literasi Digital dan Kecakapan Digital, dan *Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow with Trust*. Sejak dipercayakan sebagai pengampu DEWG, Kementerian Komunikasi dan Informatika gencar melakukan konsolidasi, koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan multi pihak untuk menyelesaikan tiga isu prioritas DEWG.

Puncak dari segala proses panjang tersebut ditandai dengan dilaksanakannya Pertemuan Keempat Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 4th G20 *Digital Economy Working Group* (DEWG) Meeting dalam *Digital*



Rhina Anita

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
JH Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Desideramus Bitan
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

Economy Minister Meeting (DMM) di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali, Kamis 1 September 2022. Pertemuan itu pun telah menghasilkan berbagai gagasan terkait tiga isu prioritas DEWG yang dirangkum dalam dokumen bernama "*G20 Digital Economy Ministers Meeting Chair Summary*".

Dalam Konferensi Persnya kala itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, para delegasi DEWG telah menyepakati beberapa poin penting dalam DEMM tentang hal-hal substantif dari tiga isu prioritas DEWG. Pertama, terkait isu prioritas tentang konektivitas digital pascapandemi Covid-19, anggota G20 DEWG menyepakati mengenai pentingnya penguatan konektivitas digital yang bersifat *people centered*. Selain itu, disepakati pula bahwa konektivitas tersebut mencakup keamanan data digital.

Selanjutnya pada isu prioritas kedua terkait kecakapan digital dan literasi digital, anggota G20 DEWG sepakat membuat kerangka untuk mengukur keterampilan dan literasi digital. Sebagaimana dijelaskan Menteri Johnny, kerangka tersebut, akan berguna untuk melakukan standarisasi pengukuran keterampilan dan literasi digital pembuatan kebijakan publik yang objektif.

Selain itu kerangka tersebut juga berguna untuk mempromosikan kerja sama internasional dan menutup kesenjangan antara keterampilan dan literasi digital, serta meningkatkan partisipasi orang-orang yang dalam situasi rentan. Dan juga disepakati pula mengenai ringkasan praktik dan kebijakan tentang keterampilan digital tingkat lanjut dan literasi digital. Sedangkan pada isu ketiga, *data free flow with trust and cross border data flow* juga mendapat perhatian khusus dari para delegasi G20 DEWG. Dalam konteks ini, Indonesia menempatkan prinsip keadilan, transparan, dan keabsahan dalam isu *data free flow with trust and cross border data flow*.

Keberhasilan Indonesia, yang dinahkodai Kementerian Kominfo dalam DEWG G20 tahun ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi multi pihak, baik dari Kementerian dan Lembaga, Institusi Pendidikan, akademisi, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya. Dari forum *Digital Economy Minister Meeting (DMM)* yang menghasilkan dokumen *G20 Digital Economy Ministers Meeting Chair Summary*, Indonesia telah mengambil bagian dan berkontribusi dalam membangun peradaban digital global di tengah derasnya arus digitalisasi saat ini. Akhirnya, mengutip pernyataan Menteri Johnny, laju percepatan konektivitas digital seyogyanya demi **Selamat membaca!** *keberhasilan manusia (people centered)*.

Keberhasilan Indonesia, yang dinahkodai Kementerian Kominfo dalam DEWG G20 tahun ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi multi pihak, baik dari Kementerian dan Lembaga, Institusi Pendidikan, akademisi, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya.



Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust

Halo Sobatkom. Setelah dua edisi sebelumnya kita membahas isu prioritas Digital Economy Working Group (DEWG) seputar konektivitas pasca pandemi Covid-19 serta literasi dan talenta digital, saatnya kita membahas isu prioritas terakhir dari DEWG, yaitu Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya.

SobatKom yang hobi akses Instagram, TikTok, belanja di Shopee, Tokopedia, dan beragam platform digital lainnya, tahu nggak bahwa setiap aktivitasmu tercatat di internet? Mulai saat kamu login akun, pilih-pilih toko, barang, hingga melakukan transaksi, setiap prosesnya diinput di ruang digital. Data-data kamu akan tersimpan di server para platform digital yang sebagian besar beroperasi di luar negeri.

Tahun 2019, Forum Ekonomi Dunia (WEF) memproyeksikan bahwa di tahun 2025 mendatang terdapat 463 exabytes data yang terbentuk setiap harinya di seluruh dunia. 1 exabyte setara dengan 1 juta terabyte (TB).

Ibaratnya, jika *hddisk external* milik SobatKom memiliki kapasitas 1 TB, artinya ada 463 juta *hddisk external* yang dibutuhkan buat menampung semua data ini di tahun 2025.

Angka ini menandakan bagaimana data tidak hanya menjadi sumber segala aktivitas manusia, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kita saat ini dan di masa depan akan sangat bergantung pada data. Coba bayangkan, bagaimana jika data-data ini beredar antar negara dan tidak diatur dengan

baik penggunaannya? Banyak risiko kejahatan dan kerugian yang mengintai kita sebagai pemilik data.

Untuk itu penting sekali diskusi tentang tata kelola data ini penting banget dan dijadikan agenda utama dalam pembahasan Digital Economy Working Group atau DEWG G20.

Menurut Menteri Koinfo, tata kelola kebijakan arus data lintas batas negara menjadi tantangan sendiri karena tiap negara punya pendekatan yang berbeda-beda. Apalagi data punya hubungan kuat dengan kedaulatan negaranya, yang juga mencakup aspek geostrategis, geopolitik, dan geoekonomi. Perspektifnya pasti akan beragam.

Oleh karena itu lewat DEWG, Indonesia mencoba menjembatani dialog perbedaan pendekatan negara ini, agar dapat dihasilkan pemahaman bersama dari para negara anggota G20.

Ada empat prinsip yang diusung Indonesia dalam pembahasan soal tata kelola data ini, yang adopsinya sudah didorong sejak Presidensi G20 Arab Saudi tahun 2020 dan terus disampaikan di berbagai forum internasional. Keempat prinsip itu adalah *lawfulness* (keabsahan), *fairness* (keadilan), *transparency* (transparansi), dan prinsip *reciprocity* (timbang balik).

Empat prinsip yang diusung Indonesia dalam pembahasan soal tata kelola data

1. *Lawfulness*

2. *Fairness*

3. *Transparency*

4. *Reciprocity*

Terkait prinsip *lawfulness*, pemerintah Indonesia menekankan bahwa proses pertukaran data harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sementara terkait prinsip *fairness*, proses pertukaran data harus memiliki tujuan yang jelas dan valid.

Lalu terkait prinsip *transparency*, Indonesia menekankan pentingnya komunikasi dan informasi mengenai pemrosesan data yang terbuka, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh para pemilik data.

Terakhir, terkait prinsip *reciprocity*, proses transfer data dapat dilakukan jika negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi, Pemroses Data Pribadi, atau organisasi internasional yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat perlindungan yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam undang-undang negara asal, atau jika terdapat perjanjian internasional antarnegara.

Prinsip *lawfulness*, *fairness*, dan *transparency* merujuk pada General Data Protection Regulation (GDPR) yang digunakan di Uni Eropa. Ketiga prinsip ini berkorelasi dan tidak dapat dipertukarkan. Sementara itu prinsip *reciprocity* merujuk pada perlunya tolok ukur kebutuhan perlindungan data, sebagai salah satu basis aliran data lintas batas.

Sudah paham SobatKom? Bagi kamu yang masih bingung, kamu bisa mengunjungi situs resmi G20 melalui tautan <https://g20.org>

Pemerintah Putuskan Pengalihan Subsidi BBM untuk Bantuan Tepat Sasaran

Kepala Negara menuturkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi BBM. Namun, Presiden menyebut bahwa kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi dari bahan bakar minyak (BBM) untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Presiden mengatakan, beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian harga.

Demikian disampaikan Presiden saat memberikan keterangan pers bersama para menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu, 3 September 2022.

“Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” ujar Presiden.

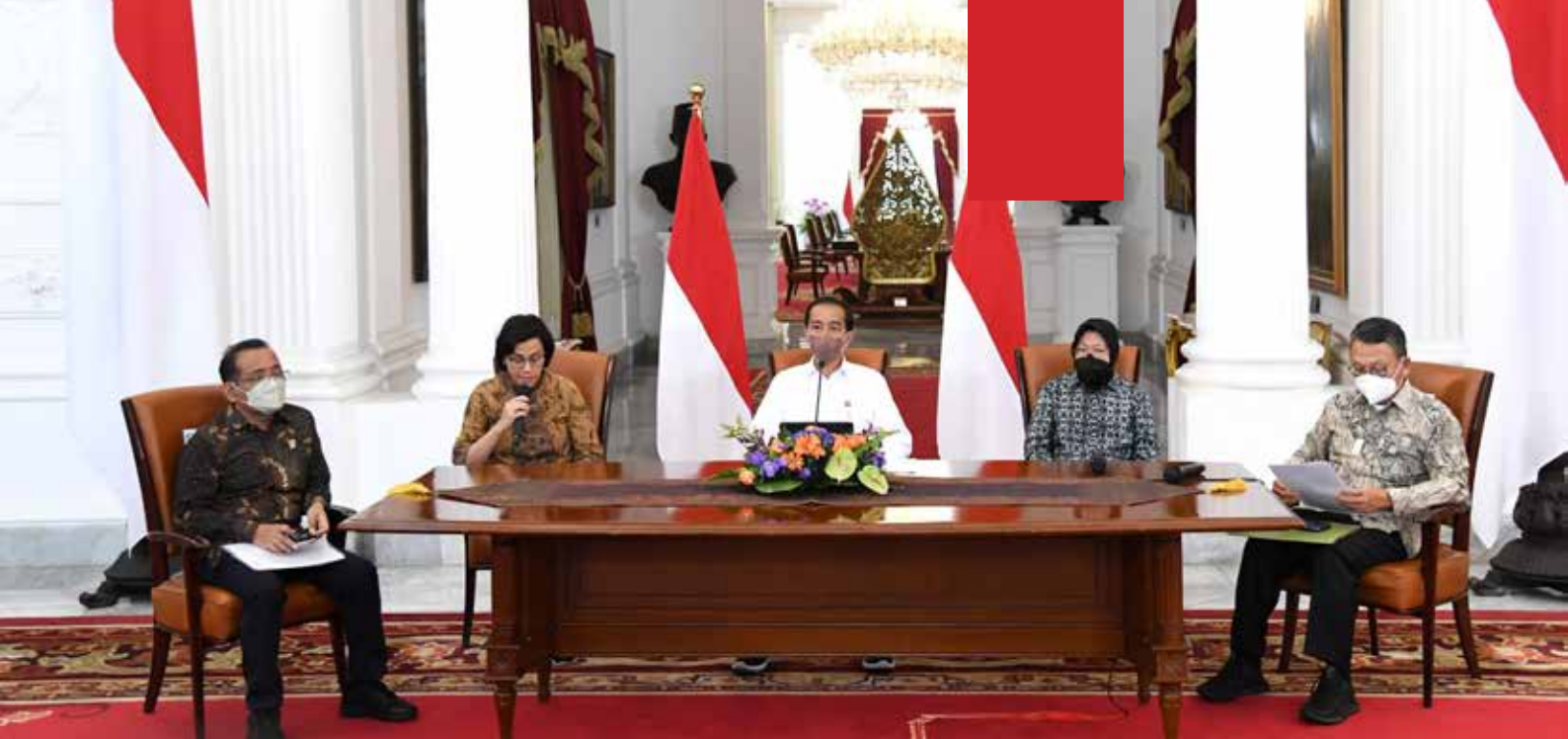
Kepala Negara menuturkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi BBM. Namun, Presiden menyebut bahwa kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat.

“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun, dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi,” tutur Kepala Negara.

Oleh sebab itu, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran, yaitu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan,” jelas Presiden.

Selain BLT BBM, Presiden melanjutkan, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk bantuan



subsidi upah yang diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

“Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum salah satunya untuk bantuan sektor transportasi.

“Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang

rakyat harus tepat sasaran, subsidi harus lebih menguntungkan untuk masyarakat yang kurang mampu,” tandas Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan penyesuaian harga BBM yang mulai berlaku pada hari ini, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

“Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Peralite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamina nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter,” jelas Menteri ESDM.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. **(BPMI Setpres)**

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/pemerintah-putusan-pengalihan-subsidi-bbm-untuk-bantuan-tepat-sasaran/>

Presiden: Kota Sofifi akan Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru Maluku Utara

Namun, sebagai sebuah ibu kota provinsi, Kota Sofifi masih harus dilengkapi dengan sarana infrastruktur lainnya.



Kota Sofifi yang berada di Provinsi Maluku Utara diperkirakan akan menjadi pusat pertumbuhan baru di masa mendatang. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo setelah meninjau UKM Mart, Kelurahan Sofifi, Kota Tidore Kepulauan pada Rabu siang, 28 September 2022.

“Kota Sofifi menjadi pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara dan dinas-dinas sudah pindah ke sini, ini juga akan menjadi titik pertumbuhan baru ke depan,” kata Presiden.

Namun, sebagai sebuah ibu kota provinsi, Kota Sofifi masih harus dilengkapi dengan sarana infrastruktur lainnya.

“Memang ada beberapa infrastruktur yang masih perlu di-back up oleh pemerintah pusat, pelabuhan, airport yang dekat di sini,” tutur Presiden.

Mengenai bentuk skema dari investasi infrastruktur yang akan dibangun, Presiden akan menyampaikan setelah diputuskan.

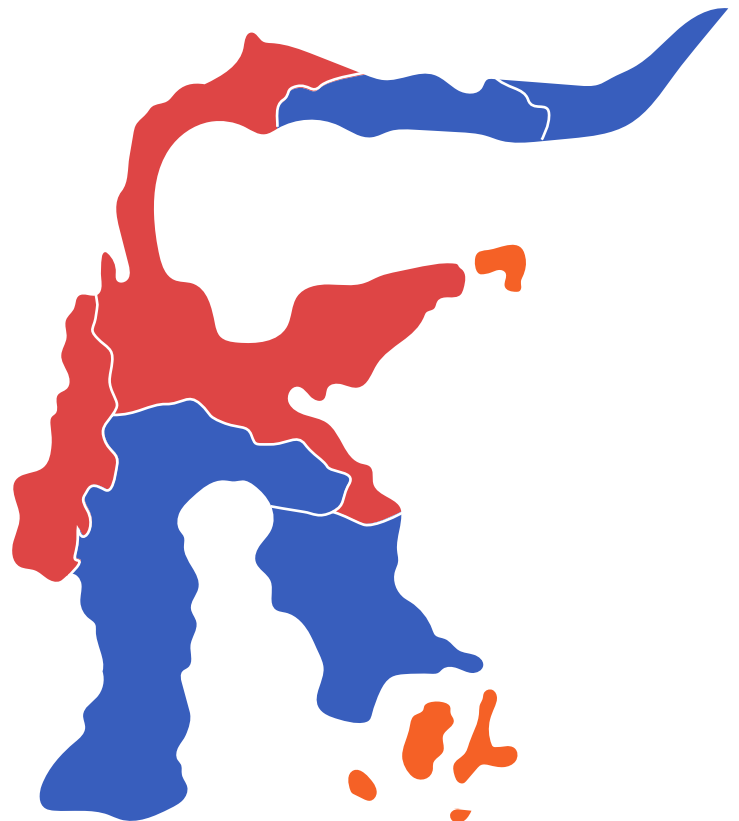
“Tadi saya sudah juga diskusi panjang dengan Pak Gubernur nanti skema yang kita cari. Segera saya info setelah ketemu,” ujar Presiden.

(BPMI Setpres)

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-kota-sofifi-akan-menjadi-pusat-pertumbuhan-baru-maluku-utara/>



Kota Sofifi menjadi pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara dan dinas-dinas sudah pindah ke sini, ini juga akan menjadi titik pertumbuhan baru ke depan



Kunjungi Kesultanan Ternate, **Presiden** Dianugerahi Gelar Adat Kesultanan

Presiden dipasangkan mahkota adat “Lastar Ngare” dan dianugerahi gelar “Dada Madopo Malomo” oleh Sultan Ternate yang memiliki arti pemimpin besar.



Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku Utara dengan mengunjungi Kedaton Sultan Ternate, Kota Ternate, pada Rabu, 28 September 2022. Di tempat tersebut, Presiden Jokowi menghadiri prosesi penganugerahan gelar adat Kesultanan Ternate.

Setibanya di Kedaton Sultan Ternate, Presiden yang mengenakan pakaian kebesaran Roke berwarna hitam, disambut langsung oleh Sultan Ternate ke-49, Hidayatullah Sjah. Setelah itu, Presiden dipasangkan mahkota adat "Lastar Ngare" dan dianugerahi gelar "Dada Madopo Malomo" oleh Sultan Ternate yang memiliki arti pemimpin besar.

"Arti dari gelarnya itu sendiri adalah seorang pemimpin besar atau pemimpin sebuah negara besar yang mana dalam memimpin negara besar itu, kearifan dan bijaksananya seorang pemimpin itu lebih dikedepankan," jelas Sultan Ternate dalam keterangannya usai prosesi penganugerahan.

Sultan Ternate menjelaskan bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah dinobatkan sebagai Pangeran Kesultanan Ternate dengan gelar Kaitjil.

"Beliau Yang Mulia Presiden Republik Indonesia juga dinobatkan sebagai Pangeran Kesultanan Ternate dengan gelar Kaitjil. Kaitjil itu pangeran atau garis kesatu dari Sultan Ternate," ucapnya.

Turut hadir dari prosesi penganugerahan yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. **(BPMI Setpres)**

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/kunjungi-kesultanan-ternate-presiden-jokowi-dianugerahi-gelar-adat-kesultanan/>



Saat Presiden Kunjungi Rumah Ibadah Bawah Tanah di Papua

Dalam perjalanan menuju pertambangan bawah tanah, Presiden singgah di Deep Mill Level Zone (DMLZ) underground, Kabupaten Mimika. Di tempat itulah terdapat Masjid Al Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria.



Meninjau rumah ibadah adalah hal biasa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun mengunjungi rumah ibadah yang berada di bawah tanah, tentu menjadi kesempatan langka. Itulah yang dilakukan Presiden bersama Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi rumah ibadah yang berlokasi di bawah tanah di Papua.

Dalam perjalanan menuju pertambangan bawah tanah, Kamis 1 September 2022, Presiden singgah di Deep Mill Level Zone (DMLZ) underground, Kabupaten Mimika. Di tempat itulah terdapat Masjid Al Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria.

Presiden dan Ibu Iriana mengagumi rumah ibadah yang bukan saja unik namun mencerminkan sebuah toleransi yang sangat tinggi. Usai kunjungan singkat itu, Presiden bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Grasberg Block Cave (GBC) Underground, Kabupaten Mimika untuk melihat langsung pertambangan bawah tanah. (BPMI Setpres)

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/saat-presiden-kunjungi-rumah-ibadah-bawah-tanah-di-papua/>





Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 13 September 2022. Foto: BPMI Setpres/Kris

Presiden Terima Surat Kepercayaan Delapan Duta Besar Negara Sahabat

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia.

Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 13 September 2022.

Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah duta besarnya tiba di Istana Merdeka. Adapun kedelapan duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden yaitu:

1. Nadia Burger, Duta Besar LBBP Kanada untuk Republik Indonesia;
2. Prapan Disyatat, Duta Besar LBBP Kerajaan Thailand untuk Republik Indonesia;
3. Thomas Loidl, Duta Besar LBBP Republik Austria untuk Republik Indonesia;
4. Kwok Fook Seng, Duta Besar LBBP Republik Singapura untuk Republik Indonesia;
5. Frank L.L Felix, Duta Besar LBBP Kerajaan Belgia untuk Republik Indonesia;
6. Machoca Moshe Tembele, Duta Besar LBBP Republik Persatuan Tanzania untuk Republik Indonesia;
7. Jukka-Pekka Kaihilahti, Duta Besar LBBP Republik Finlandia untuk Republik Indonesia; dan
8. Serob Bejanyan, Duta Besar LBBP Republik Armenia untuk Republik Indonesia.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia. Seluruh duta besar tersebut untuk selanjutnya akan berkedudukan di Indonesia (Jakarta).

Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo, para duta besar beserta pendamping masing-masing berpamitan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Laksma TNI Hersan, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara, Andy Rachmianto.

(BPMI Setpres)

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-terima-surat-kepercayaan-delapan-duta-besar-negara-sahabat/>



Harapan Para Pelaku Usaha Startup Usai Dikunjungi Presiden

Salah satu stan yang dikunjungi Presiden yakni milik perusahaan rintisan bernama Pitik yang bergerak dalam bidang pemberdayaan peternak ayam.



Usai meresmikan Pembukaan BUMN Startup Day Tahun 2022, Presiden Joko Widodo meninjau beberapa stan pelaku usaha perusahaan rintisan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Senin, 26 September 2022.

Salah satu stan yang dikunjungi Presiden yakni milik perusahaan rintisan bernama Pitik yang bergerak dalam bidang pemberdayaan peternak ayam. Presiden berpeseran kepada perusahaan tersebut untuk terus membantu memberdayakan komunitas peternak.

“Dari Pak Jokowi sih pesannya satu ya, bagaimana kita bisa membantu memberdayakan komunitas-komunitas peternak di Indonesia dari hulu sampai hilir,” jelas Rymax selaku Co-Founder dan Chief Operating Officer (COO) Pitik.

Rymax berharap ke depannya pihaknya mendapatkan dukungan dari pemerintah agar tujuan perusahaannya untuk memberi dukungan kepada para peternak ayam dapat terus berkelanjutan.

Stan perusahaan rintisan lain yang dikunjungi oleh Kepala Negara yakni Fishlog, perusahaan yang bergerak dalam bidang rantai pasok ikan di Indonesia. Bayu Anggara selaku Co-Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Fishlog juga berharap agar mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah sehingga dapat mengintegrasikan segala hal yang akan dilakukan oleh pihaknya.

“Kami berharap, pertama kami percaya saya dan tim bahwa ikan itu sangat strategis kalau kita berbicara komoditas strategis baik itu lokal maupun ekspor. Pasti butuh support langsung dari pemerintah dalam hal memberi jalan, memberi akses, memberi exposure kepada pemain-pemain ikan supaya bisa masuk ke ekosistem kita,” harap Bayu.

Untuk diketahui, acara tersebut diikuti oleh 150 peserta yang merupakan perusahaan rintisan yang telah terkurasi. Acara tersebut diharapkan dapat menjembatani para pelaku usaha dengan ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan yakni, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

(BPMI Setpres)



Kami berharap, pertama kami percaya saya dan tim bahwa ikan itu sangat strategis kalau kita berbicara komoditas strategis baik itu lokal maupun ekspor. Pasti butuh support langsung dari pemerintah dalam hal memberi jalan, memberi akses, memberi exposure kepada pemain-pemain ikan supaya bisa masuk ke ekosistem kita



<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/harapan-para-pelaku-usaha-startup-usai-dikunjungi-presiden/>

Pembukaan BUMM Startup Day

19

Kabar Istana



20
ONESIA
2

DIGITAL ECONOMY MINISTERS' MEETING

xo

BALI, 1 SEPTEMBER 2022





Isu Substantif Ekonomi Digital Jadi Konsensus G20



Serta untuk mempromosikan kerja sama internasional dan menutup kesenjangan antara keterampilan dan literasi digital untuk meningkatkan partisipasi orang-orang yang dalam situasi rentan dalam ekonomi digital. Disepakati pula mengenai ringkasan praktik dan kebijakan tentang keterampilan digital tingkat lanjut dan literasi digital



Pertemuan Menteri Ekonomi Digital atau Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) menjadi puncak dari serangkaian Pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital (*Digital Economy Working Group/DEWG*) yang telah berlangsung sepanjang tahun 2022.

Sebelum gelaran DEMM, Indonesia telah menggelar empat kali pertemuan DEWG sebagai rangkaian agenda Presidensi G20 di empat lokasi berbeda, yaitu 1st Meeting di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Februari 2022, lalu 2nd Meeting di kota Yogyakarta pada Mei 2022. Dilanjutkan dengan 3rd Meeting di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Juli 2022. Terakhir, 4th Meeting digelar di Nusa Dua, Bali, yang ditutup dengan gelaran DEMM.



Dokumen tersebut menunjukkan bahwa untuk seluruh isi substantif, Presidensi Indonesia telah memperoleh konsensus dari seluruh DEWG sesuai isu prioritas.



Dalam sidang keempat DEWG yang berlangsung sejak 29 Agustus 2022 tersebut, telah dicapai kesepakatan penting untuk disampaikan kepada pemimpin negara-negara anggota G20 pada November mendatang. Substansi isu yang disepakati di DEWG maupun DEMM akan melengkapi komunikasi yang disiapkan untuk Bali Package pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, November 2022.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam dua dokumen yang berisikan mengenai hal-hal substantif di tiga isu prioritas yang sudah dibahas sejak 1st DEWG Meeting, yakni konektivitas digital pascapandemi Covid-19; kecakapan dan literasi digital; serta *data free flow with trust and cross border data flow*. Sedangkan dokumen lainnya berisikan rangkuman mengenai pembahasan para delegasi soal dinamika ekonomi digital saat ini.

“Dokumen tersebut menunjukkan bahwa untuk seluruh isi substantif, Presidensi Indonesia telah memperoleh konsensus dari seluruh DEWG sesuai isu prioritas,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate saat temu media di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9/2022).

Dijabarkan, pada prioritas pertama menyangkut konektivitas digital pascapandemi Covid-19,



anggota G20 DEWG menyepakati mengenai perlunya penguatan konektivitas digital yang bersifat *people-centered connectivity*. Selain itu, disepakati pula bahwa konektivitas tersebut mencakup keamanan data digital.

Kemudian pada prioritas kedua terkait kecakapan digital dan literasi digital, anggota G20 DEWG sepakat untuk membuat kerangka untuk mengukur keterampilan dan literasi digital.

Kerangka tersebut, menurut Menkominfo, akan berguna untuk melakukan standardisasi pengukuran keterampilan dan literasi digital pembuatan kebijakan publik yang objektif.

“Serta untuk mempromosikan kerja sama internasional dan menutup kesenjangan antara keterampilan dan literasi digital untuk meningkatkan partisipasi orang-orang yang dalam situasi rentan dalam ekonomi digital. Disepakati pula mengenai ringkasan praktik dan kebijakan

tentang keterampilan digital tingkat lanjut dan literasi digital,” terang Menteri Johnny G. Plate.

Selanjutnya pada prioritas ketiga terkait *data free flow with trust and cross border data flow*, lanjutnya, menjadi salah satu hal yang paling mendapatkan perhatian dari anggota DEWG.

Menyangkut hal ini, Indonesia, kata Menteri Johnny, menempatkan prinsip keadilan, transparan, dan keabsahan menjadi hal yang tak bisa ditawar.

Dokumen “The Chair Summary” dan langkah-langkah konkret dalam dokumen DEWG ini akan disampaikan sebagai masukan bagi Presiden Joko Widodo selaku pemegang Presidensi G20 2022 dalam memimpin Konferensi Tingkat Tinggi G20 November mendatang.

Pertemuan juga menyambut baik inisiatif Indonesia yakni G20 Digital Innovation Network (DIN) dan G20 Digital Platform Transformation Expo (DPTE).

DEWG bermula saat G20 menempatkan isu digitalisasi sebagai salah satu katalisator utama sumber pertumbuhan ekonomi baru sejak tahun 2016.

Pembahasan mengenai pemanfaatan digital terus berlangsung hingga kini termasuk dalam Presidensi G20 Indonesia yang mengangkat tiga agenda utama yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi.

Komitmen anggota G20 dalam membahas perkembangan teknologi digital, termasuk ekonomi digital terwujud pada perubahan Digital Economy Task Force yang meningkat menjadi DEWG pada Presidensi G20 Italia tahun lalu. Peningkatan Digital Economy Task Force menjadi DEWG ini dinilai selaras dengan pertumbuhan pesat ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

DEWG diberikan kewenangan untuk memajukan pembahasan ekonomi digital secara lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

Pada Presidensi G20 Indonesia 2022, Kementerian Kominfo memegang peranan penting dalam melakukan streamlining pembahasan isu transformasi ekonomi berbasis digital oleh Working Groups dan Engagement Groups yang ada.

Pertemuan 4th DEWG Meeting dan DEMM dihadiri oleh 19 anggota G20, enam negara undangan, organisasi internasional, perguruan tinggi, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Siber dan Sandi Negara.



DEWG INDONESIA

DIGITAL ECONOMY

ACHIEVING A RESILIENT RECOVERY:
WORKING TOGETHER FOR A MORE INCLUSIVE,
EMPOWERING, AND SUSTAINABLE
DIGITAL TRANSFORMATION

4th DEWG MEETING

BALI, 29-30 AUGUST 2022





Semangat Kolaborasi Nusa Dua

Menginspirasi

Sidang Keempat

DEWG G20

Tarian tradisional Bali Puspa Warna menyambut para delegasi Sidang Keempat Kelompok Kerja Ekonomi Digital/The 4th *Digital Economy Working Group* (DEWG) Meeting G20 di Unity Garden, Mulia Resort, Nusa Dua, Bali, Minggu malam (28/8/2022).

Atraksi penari dari Sanggar Paripurna ini berkisah mengenai keharuman dan keindahan suatu bunga. Sebagai sebuah simbol sekaligus harapan agar Pertemuan DEWG yang keempat dapat memberikan hasil yang terbaik.

Pentas seni tersebut menjadi bagian dari sajian makan malam selamat datang delegasi DEWG G20 yang bersidang pada 29-30 Agustus 2022. Kemudian akan dilanjutkan pada Digital Economy Ministerial Meeting (DEMM) pada 1-2 September 2022. Hidangan tradisional Bali dan menu khas Nusantara disajikan kepada delegasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pengampu DEWG G20

memiliki kisah tersendiri. Kenapa memilih Nusa Dua sebagai lokasi sidang keempat DEWG.

Sebelumnya DEWG sebagai rangkaian agenda Presidensi G20 Indonesia digelar di Lombok (Nusa Tenggara Barat) Februari 2022, Yogyakarta Mei 2022, dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur) Juli 2022.

Kepada delegasi G20, Chair DEWG G20 Mira Tayyiba mengisahkan tentang perkembangan Nusa Dua, yang artinya dua pulau kecil di Semenanjung Bukit di Pulau Dewata. Di akhir tahun 1960-an, "Dua Pulau" itu hanya tampak sebagai sebidang pasir putih di sisi tenggara Bukit Peninsula, titik paling selatan Bali.

Ketika itu, Nusa Dua bukan tempat populer untuk dihuni. Lahannya hanya ditumbuhi pohon kelapa, air bersih terbatas, aliran listrik masih sulit dan belum ada jalan raya seperti sekarang ini.

Lambat laun sejak 1970-an, setelah adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat serta berbagai pihak lintas sektor, kawasan Nusa Dua dapat berkembang menjadi lebih maju hingga saat ini.

Kini, Nusa Dua telah mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi baik secara nasional maupun global atas perencanaan serta pengembangan kawasan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Tak mengherankan, sidang keempat DEWG dilaksanakan di Nusa Dua, Bali. Sebagai kawasan yang dikenal sebagai destinasi wisata dengan pantai berpasir putih, serta penginapan terbaik di Pulau Dewata yang dibangun dengan kesadaran akan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Setelah perjalanan yang begitu panjang, saat ini kita akan memasuki Pertemuan DEWG yang keempat dan saya berharap Pulau Dewata yang memesona dapat menambah semangat delegasi anggota G20 untuk terus aktif mengikuti dan berkontribusi terhadap agenda pertemuan beberapa hari ke depan,” tukas Mira yang juga sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tersebut.



Setelah perjalanan yang begitu panjang, saat ini kita akan memasuki Pertemuan DEWG yang keempat dan saya berharap Pulau Dewata yang memesona dapat menambah semangat delegasi anggota G20 untuk terus aktif mengikuti dan berkontribusi terhadap agenda pertemuan beberapa hari ke depan



Saat membuka secara resmi Pertemuan Keempat DEWG G20, Senin (29/8/2022), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pun berharap pertemuan tersebut menjadi titik terakhir untuk merumuskan The Bali Packages yang bisa dibawa ke pertemuan selanjutnya.

Adapun kelompok kerja ekonomi digital sudah mencapai kesimpulan tentang beberapa topik pembahasan. Yakni mulai dari People-Centered Digital Connectivity, Digital Security as Key Enabler to Support Business Continuity, G20 Digital Innovation Network, Digital Transformation Expo dan ITU's Smart Village and Smart Island Initiative.

Sedangkan isu prioritas lainnya yang perlu pembahasan lebih lanjut adalah isu Data Free Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF).



Kisah Nusa Dua, Cermin Pembangunan Berkelanjutan dan Kolaborasi

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Chair *Digital Economy Working Group* (DEWG) Mira Tayyiba mengisahkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Nusa Dua, Bali dalam sambutannya di jamuan makan malam delegasi dan para undangan 4th DEWG Meeting.

Pertemuan keempat DEWG dilaksanakan di Nusa Dua, Bali dimana lokasi ini merupakan area yang dikenal sebagai destinasi wisata dengan pemandangan indah, pantai pasir putih, serta penginapan terbaik di Pulau Dewata yang dibangun dengan kesadaran akan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Sekjen Mira Tayyiba mengisahkan tentang perkembangan Nusa Dua, yang artinya dua pulau kecil di Semenanjung Bukit. Di akhir tahun 1960-an, "Dua Pulau" itu hanya tampak sebagai sebidang pasir putih di sisi tenggara Bukit Peninsula, titik paling selatan Bali.

"Saat itu, Kawasan ini bukan tempat yang populer untuk ditinggali karena tanahnya saja hanya bisa ditumbuhi pohon kelapa, air murni terbatas, ketersediaan listrik masih sangat sulit dan jarang, serta jalan raya seperti yang kita ketahui sekarang belum ada," jelasnya saat membuka Welcome Dinner DEWG G20 di Unity Garden Mulia Resort Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (28/08/2022).

Namun, setelah adanya kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat serta berbagai pihak lintas sektor, kawasan Nusa Dua dapat berkembang menjadi lebih maju hingga saat ini.

"Di tahun 70-an, Pemerintah Indonesia, bergandengan tangan dengan masyarakat Bali dan pihak-pihak dari berbagai sektor mulai merencanakan dan mengembangkan model terpadu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk tujuan wisata di Bali," ujar Sekjen Mira Tayyiba.

Sekjen Mira Tayyiba juga menyampaikan bahwa Nusa Dua telah mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi baik secara nasional maupun global atas perencanaan serta pengembangan kawasan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

"Anda mungkin telah menyaksikan pantai pasir putih, pemandangan laut yang indah, dan taman



yang rimbun di tengah resor mewah yang secara jelas menggambarkan Nusa Dua sebagai salah satu lokasi yang paling mewah di Pulau Bali," ungkapnya.

Selama setidaknya empat hari kedepan, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan 4th *Digital Economy Working Group* (DEWG) yang dilanjutkan dengan *Digital Economy Ministerial Meeting* (DEMM) yang bertempat di Mulia Resort, Nusa Dua. Dalam pertemuan ini pula, Industry Task Force DEWG akan mempertunjukkan adopsi teknologi digital Indonesia kepada seluruh delegasi dari negara anggota G20 sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan industri.



Sapa Delegasi dengan Bahasa Bali

Menkominfo Johnny G. Plate menyambut kedatangan delegasi di Bali untuk melanjutkan pembahasan dalam pertemuan keempat Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau *Digital Economy Working Group* (DEWG) Presidensi G20 Indonesia.

"Selamat datang di Bali, Om Swastiastu, Rahajeng Semeng dan Rahajeng Wengi semuanya. Dengan sepenuh hati dan sukacita, saya menyambut Anda semua, para delegasi negara anggota G20 dan negara tamu undangan yang telah menyediakan waktunya untuk berada di sini secara fisik dan dapat bergabung dengan kami melalui sarana virtual," ungkapnya saat membuka 4th DEWG Meeting di Mulia Resort Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin (29/08/2022).

Menkominfo mengapresiasi kolaborasi delegasi DEWG G20 untuk membahas agenda digital global. "Dengan terselenggaranya persidangan DEWG saya yakin atas langkah Presidensi G20 sejauh ini dan mendorong negara-negara anggota serta negara tamu undangan untuk melakukan diskusi yang produktif dalam beberapa hari ke depan," tuturnya.



dengan terselenggaranya persidangan DEWG saya yakin atas langkah Presidensi G20 sejauh ini dan mendorong negara-negara anggota serta negara tamu undangan untuk melakukan diskusi yang produktif dalam beberapa hari ke depan.





Menteri Johnny juga mengapresiasi kerja keras Chair DEWG Mira Tayyiba dan Alternate Chair Dedy Permadi, untuk memetakan arah diskusi DEWG yang mencakup tiga isu prioritas selama seluruh pertemuan dan dua pertemuan antarsesi.

“Saya bersyukur, kita akan segera menyimpulkan pembahasan dokumen Bali Package. Mari kita berkolaborasi menyelesaikan Bali Package dengan semangat kebersamaan dalam mencapai pemulihan yang tangguh untuk transformasi digital yang lebih inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Recover Together, Recover Stronger” tandasnya.

Sebelumnya, pertemuan DEWG diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat; Daerah Istimewa

Yogyakarta, dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga telah berlangsung dua workshop dan dua pertemuan antarsesi untuk membahas agenda transformasi digital global.

Adapun pada sidang keempat DEWG ini terdapat 18 delegasi yang hadir secara fisik yakni Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Hanya delegasi Argentina yang hadir secara virtual.

Sementara sejumlah negara undangan yang hadir dalam sidang keempat DEWG G20 yaitu Spanyol, Belanda, Singapura, Rwanda, Kamboja, dan Persatuan Arab Emirat (UAE).







4th DEWG Meeting: Susun Deklarasi Menteri untuk Masa Depan Digital Global



Penyusunan deklarasi selama persidangan Kelompok Kerja Ekonomi Digital tidak hanya berdasarkan aspirasi Pemerintah Republik Indonesia saja, tapi untuk masa depan digital.



Pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau *Digital Economy Working Group* (DEWG) Presidensi G20 Indonesia berupaya menyusun agenda transformasi digital global.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengidentifikasi adanya realitas kesenjangan digital yang mengkhawatirkan, kurangnya pemahaman kecakapan literasi dan keahlian digital, serta kebocoran data yang meningkat. Oleh karena itu, Menkominfo mengajak seluruh delegasi untuk merumuskan deklarasi untuk mengatasi tantangan masa depan digital.

“Penyusunan deklarasi selama persidangan Kelompok Kerja Ekonomi Digital tidak hanya berdasarkan aspirasi Pemerintah Republik Indonesia saja, tapi untuk masa depan digital,” tegasnya saat membuka 4th DEWG Meeting di Mulia Resort Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin (29/08/2022).

Menurut Menteri Johnny, nilai ekonomi digitalisasi serta keselarasan aliran data lintas batas negara untuk menghasilkan ide dan



inovasi baru menjadi isu mendasar. Menkominfo juga mengharapkan pembahasan isu ini akan terus berlanjut pada presidensi mendatang.

Sebagai forum DEWG pertama setelah elevasi dari Gugus Tugas Ekonomi Digital, Menkominfo menyatakan ada banyak peluang dalam sektor digital yang bisa menjadi perhatian bersama.

“Pada saat yang sama, kami melihat dan mengetahui peluang yang ada di depan, nilai ekonomi digitalisasi, keselarasan aliran data dalam menghasilkan ide-ide baru, dan inovasi teknologi. Fakta sekarang DEWG merupakan kelompok pertama setelah pengangkatan status dari gugus tugas ekonomi digital,” jelasnya.

Oleh karena itu, Menkominfo mengajak seluruh delegasi untuk bekerja bersama mendukung sampai akhir Presidensi G20 Indonesia dalam merumuskan pemahaman dan kebijakan di bidang transformasi digital.

“Selama dua hari ke depan, kita bersama-sama akan menyusun deklarasi, yang akan memfasilitasi kemajuan agenda digital. Untuk itu, ayo dukung akhir dari pertemuan presidensi ini dan tentu saja percayalah kerja sama kita ke depan akan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Dorong Bali Package Jadi Kesepakatan Bersama

Dalam pertemuan ini, Menkominfo Johnny G. Plate mendorong delegasi untuk menyepakati hasil diskusi atau pembahasan isu yang diusung Presidensi G20 Indonesia untuk penyusunan dokumen Bali Package.

“Saya bersyukur, kita telah membahas ketiga isu prioritas kelompok kerja ekonomi digital.



Saya bersyukur, kita akan segera menyimpulkan pembahasan dokumen Bali Package,” tuturnya.

Dalam diskusi mengenai Konektivitas Digital dan Pemulihan Pasca Covid-19, Indonesia telah menyimpulkan konsep *people centered* sebagai perpanjangan dari konektivitas digital yang berpusat pada manusia atau human centered.

“Pada isu prioritas kedua, para delegasi memberi tanggapan positif atas upaya Pemerintah Indonesia dalam memajukan keterampilan digital masyarakat dan literasi digital,” ungkap Menkominfo.

Bahkan anggota G20 menyambut baik toolkit untuk mengukur keterampilan digital dan literasi digital serta berbagi pengalaman untuk meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam ekonomi digital. Hal ini juga meliputi pertukaran kebijakan dengan keterampilan literasi digital tingkat lanjut.

Adapun mengenai isu prioritas ketiga yang berfokus pada pembahasan aliran data bebas dan aliran data lintas batas, Menkominfo mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengakui pentingnya prinsip-prinsip pemersatu dalam tata kelola aliran data.

“Pemerintah Indonesia mengusulkan diskusi tentang prinsip-prinsip yang ditetapkan seperti kepatuhan hukum, keadilan, transparansi, dan sampai batas tertentu menekankan soal timbal balik,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan telah mempertemukan berbagai stakeholders untuk membahas

secara mendalam jalan ke depan untuk mengoperasionalkan aliran data bebas dengan kepercayaan dan aliran data lintas batas.

“Selain itu, dalam diskusi kami juga menyoroti key enabler sangat penting dalam penerapan identitas digital yang relevan dengan transaksi digital yang melibatkan data pribadi,” tandasnya.

Dorong Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Keabsahan Tata Kelola Data

Presidensi G20 Indonesia mengusulkan penerapan prinsip umum dalam tata kelola data global. Usulan itu menjadi isu prioritas ketiga dalam *Digital Economy Working Group* (DEWG), yaitu data free flow with trust dan cross-border data flow.



Pemerintah Indonesia mengusulkan diskusi tentang prinsip-prinsip yang ditetapkan seperti kepatuhan hukum, keadilan, transparansi, dan sampai batas tertentu menekankan soal timbal balik.



“Forum DEWG telah mengakui upaya Presidensi G20 Indonesia untuk memulai diskusi terkait prinsip-prinsip data free flow with trust dan cross-border data flow, antara lain keadilan, transparansi, dan keabsahan,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers Hasil Sidang Digital Economic Ministers’ Meeting (DEMM) di Hotel Mulia, Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (01/09/2022).

Menurut Menteri Johnny, dalam pertemuan DEWG, delegasi mengapresiasi kesuksesan Presidensi G20 Indonesia dalam melaksanakan Workshop of Multistakeholders Dialogue on Identifying Measures to Facilitate the Different Levels of Understanding of Data Governance.

“Kesuksesan yang mempertemukan pemangku kepentingan dari negara Anggota G20 dalam membahas pentingnya tata kelola data,” ujarnya.

Mengenai pandangan forum terhadap peran identitas digital, menurut Menkominfo, para delegasi telah menghasilkan kesepakatan mengenai tata kelola data dalam laporan Identifying Key Enablers on Digital Identity.

“Sedangkan di sisi lain, dokumen tersebut juga menjelaskan dinamika diskusi antara anggota DEWG G20 terkait pengaruh dinamika politik dunia, khususnya konflik Rusia-Ukraina. Indonesia memahami dampak situasi geopolitik yang terjadi terhadap kondisi ekonomi global sebagai presidensi yang bersikap netral dan imparial, Indonesia telah menjembatani diskusi yang sesuai dengan mandat utama DEWG, yaitu untuk isu-isu ekonomi digital dan bukan isu politik,” jelas Menteri Johnny.

Mengenai perumusan langkah konkret yang akan dilakukan sesuai dokumen tersebut, Menkominfo menyatakan akan menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Dokumen ini akan disampaikan sebagai masukan bagi Bapak Presiden Joko Widodo, dalam memimpin Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan digelar di bulan November nanti,” tuturnya.



Kesuksesan yang mempertemukan pemangku kepentingan dari negara Anggota G20 dalam membahas pentingnya tata kelola data.



Dalam konferensi pers, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba dan Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi.

Susun Dokumen Pengukuran Kecakapan dan Literasi Digital

Rangkaian pertemuan Digital Economic Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia berhasil menyusun dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, dokumen tersebut merupakan hasil pencapaian Menteri Ekonomi Digital G20 yang membahas mengenai isu prioritas kedua DEWG, yaitu kecakapan digital dan literasi digital.

“Dokumen ini bermanfaat untuk standarisasi pengukuran indikator literasi dan kecakapan digital, guna pengambilan kebijakan publik yang lebih objektif, serta mendorong kerjasama

internasional dalam mengatasi gap antarnegara menjawab tantangan masa depan digital,” jelasnya Konferensi Pers hasil Digital Economy Ministers’ Meeting di Hotel Mulia, Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (01/09/2022).

Menurut Menkominfo, pertemuan Menteri Ekonomi Digital G20 juga berhasil menyusun kompilasi laporan terkait kebijakan dan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi bermakna bagi kelompok rentan dalam ekonomi digital.

“Juga dokumen ringkasan praktik dan kebijakan mengenai kecakapan digital dan literasi digital tingkat lanjut,” jelasnya.

Menteri Johnny menjelaskan selama pertemuan DEWG baik dari sidang pertama hingga keempat dan pelaksanaan DEMM sebagai puncak acara, setiap delegasi dari Negara Anggota G20 telah menyampaikan pandangannya masing-masing, termasuk untuk isu prioritas kedua DEWG.

“Seluruh ide, gagasan, dan dinamika yang berkembang telah dirangkum ke dalam sebuah dokumen bernama *G20 Digital Economy Minister Meeting 2022 Chairs Summary*, yang telah saya bacakan di depan para Menteri Ekonomi Digital Negara-negara Anggota G20,” tuturnya.





DIGITAL ECONOMY MINISTERS' MEETING

x6
BALI, 1 SEPTEMBER 2022

DEM

DEM



DEM G20 Sepakati Konektivitas Digital Berbasis People Centered

Pertemuan Menteri Ekonomi Digital atau Digital Economic Ministers' Meeting (DEM) menjadi puncak pertemuan Digital Economic Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia 2022.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Menteri Ekonomi Digital Negara Anggota G20 telah mendengarkan G20 Digital Economy Minister Meeting (DEM) 2022 Chairs Summary sebagai hasil pertemuan puncak dalam rangkaian Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia.

Pertemuan tingkat menteri tersebut membahas tiga isu prioritas yang berkaitan dengan ekonomi digital yang telah disepakati delegasi negara anggota G20. Dalam empat pertemuan DEWG

Pencapaian tersebut untuk prioritas pertama konektivitas dan pemulihan pasca Covid-19, pertemuan menyepakati agar penguatan konektivitas digital harus bersifat *people centered*

sebelumnya, perwakilan Anggota G20 telah menyampaikan pandangan masing-masing dan saling bertukar ide dan gagasan. Semua berkaitan dengan tiga isu prioritas yaitu konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi Covid-19, kecakapan dan literasi digital, serta data free flow with trust and cross-border data flow.

“Kami baru saja selesai rapat Digital Economic Ministers Meeting. DEMM merupakan puncak pertemuan Digital Economy Working Group yang membahas isu-isu prioritas ekonomi digital pada Presidensi G20 Indonesia,” jelasnya dalam Konferensi Pers DEMM G20 di Ballroom Hotel Mulia, Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (01/09/2022).

Berkaitan dengan isu prioritas pertama, konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi Covid-19, Menkominfo menyatakan Menteri Ekonomi Digital negara G20 menyepakati beberapa pencapaian substansi yang disampaikan dalam Sidang DEMM.

“Pencapaian tersebut untuk prioritas pertama konektivitas dan pemulihan pasca Covid-19, pertemuan menyepakati agar penguatan konektivitas digital harus bersifat *people centered*,” jelasnya saat menyampaikan hasil pertemuan DEMM dalam Konferensi Pers di Hotel Mulia, Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (01/09/2022).

Dalam penyelenggaraan DEWG selama kurun waktu 6 bulan terakhir, Kementerian Kominfo telah menggelar

empat pertemuan sebagai upaya untuk mendiskusikan langkah-langkah bersama di antara negara anggota G20 atas tiga isu prioritas DEWG 2022.

“Seluruh ide, gagasan, dan dinamika yang berkembang telah dirangkum ke dalam sebuah dokumen bernama G20 Digital Economy Minister Meeting 2022 Chairs Summary, yang telah saya bacakan di depan para menteri bidang ekonomi digital negara-negara anggota G20,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, Delegasi Negara Anggota G20 juga menyepakati pentingnya keamanan digital sebagai kunci keberlanjutan bisnis. Selain itu, delegasi juga menyambut baik berbagai inisiatif Presidensi G20 Indonesia.

“Seperti G20 Digital Innovation Network (IDN), Digital Transformation Expo (DTE), dan inisiatif Small Village dan Small Island bersama dengan International Telecommunication Union (ITU),” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Johnny menjelaskan dokumen keluaran DEWG Presidensi G20 Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pencapaian kesepakatan substantif antara Menteri Ekonomi Digital di tiga isu prioritas DEWG G20, dan kedua rangkuman atas dinamika pembahasan para delegasi dalam menyikapi tantangan global.

“Dokumen tersebut menunjukkan bahwa untuk seluruh isi substantif Presidensi G20 Indonesia, telah memperoleh konsensus dari seluruh anggota delegasi sesuai isu prioritas DEWG,” tandasnya.



Dorong Kolaborasi untuk Digitalisasi Global

G20 memiliki peran penting sebagai katalis pergerakan global. Oleh karena itu, Menkominfo mendorong kolaborasi dalam Forum Digital Economy Working Group (DEWG) untuk memajukan digitalisasi global. Menurutnya rangkaian pertemuan DEWG merupakan upaya Presidensi G20 Indonesia untuk mengawali kolaborasi global yang lebih bermanfaat.

“Hari ini, kita dapat mendorong kerja sama kita dalam memajukan digitalisasi di seluruh dunia. Saya mendorong kita semua untuk membuka diri dan mempersiapkan kolaborasi di masa depan dan berbalik menuju tujuan ekosistem digital yang tangguh dan berkelanjutan.” ujarnya dalam sambutan Pembukaan Digital Economy Ministers Meeting (DEMM), di Hotel Mulia Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (01/09/2022).

Menkominfo menyatakan Indonesia juga mengusulkan prakarsa Forum Multistakeholder bernama Forum Tata Kelola Data Bali. Menurutnya forum itu akan menjadi wahana pertemuan terbuka untuk semua secara sukarela negara anggota G20.

“Kami berharap forum ini dapat menjadi kelanjutan dari upaya kami dalam membangun kerangka kerja sama data global dan operasionalisasi aliran data antarnegara,” harapnya.

DEMM dipimpin langsung oleh Menkominfo Johnny G. Plate yang diisi dengan pernyataan umum Ketua Delegasi Anggota G20 dan tamu undangan.

Sebelumnya Menteri Johnny mengungkapkan perubahan besar karena pandemi Covid-19 yang telah mengubah cara berinteraksi manusia dan rantai pasokan global. Seiring dengan peningkatan pemanfaatan teknologi digital, ada tantangan berkaitan dengan kesenjangan digital, keamanan digital, keterampilan dan literasi digital yang tidak memadai, serta hambatan untuk memanfaatkan ekonomi berbasis data.

Serahkan Kepemimpinan DEWG kepada India

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyerahkan kepemimpinan Digital Economy Working Group (DEWG) kepada Menteri Elektronika dan Teknologi Informasi India Ashiwini Kumar Vaishnav, di Hotel Mulia, Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (01/09/2022).

Penyerahan yang ditandai dengan penyerahan token Ganesha itu berlangsung usai Digital Economy Ministers' Meeting (DEMM) G20.

Pertemuan DEMM G20 ini dihadiri oleh sembilan menteri atau wakil Menteri, serta 10 pejabat tinggi anggota G20. Lima menteri atau wakil menteri non G20 member yang hadir sebagai invitee, dua perwakilan dari organisasi internasional yakni United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), dan International Telecommunication Union (ITU).

Agenda ini dilaksanakan usai pertemuan 4th DEWG 2022 sebagai akhir pembahasan dari tiga pertemuan sebelumnya yang sudah berlangsung.

Dengan berakhirnya rangkaian penyelenggaraan pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia yang ditutup dengan Digital Economy Ministers Meeting (DEMM), Menkominfo berharap delegasi yang hadir langsung Indonesia akan mendapatkan kenangan dan pengalaman yang berharga.

"Penyelenggaraan DEWG selama ini telah menciptakan kenangan tersendiri dan sangat menyentuh bagi para delegasi yang hadir. Perpaduan keindahan alam serta keramahan masyarakat semoga menjadi kenangan yang indah," ujar Menteri Johnny kepada jurnalis dalam Konferensi Pers Hasil DEMM di Hotel Mulia, Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (01/09/2022).

Menurut Menkominfo, atas nama masyarakat, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan penghargaan yang tinggi kepada para delegasi.

"Testimoni dan komentar positif dari para peserta dan juga para Menteri Bidang Ekonomi Digital G20, mengakui sangat menikmati rangkaian kegiatan DEWG. Pengakuan itu disampaikan juga secara langsung kepada saya sebagai apresiasi mereka dan nikmatnya keramahan Indonesia," jelasnya.



Menkominfo menyatakan, momentum langka DEWG menjadi peristiwa yang membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Terlebih lagi hasil karya anak bangsa yang ditampilkan dalam pertemuan DEWG tidak hanya untuk negara anggota G20, tetapi memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat dunia.

"Bagi saya khususnya dan saya yakin bahwa pertemuan para pemimpin di bidang ekonomi digital G20 tidak akan berhenti di sini, kepemimpinan Indonesia dalam forum G20 akan terus bergema di forum kepemimpinan dunia lainnya," ujarnya.

Menteri Johnny menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada berbagai pihak yang telah terlibat dalam menyukseskan rangkaian pertemuan DEWG. Selama hampir enam bulan berjalan, kesuksesan itu tidak terlepas dari peran mitra kerja Kementerian Kominfo.

"Saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan oleh para stakeholders, rekan-rekan media, dan juga seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan DEWG tahun ini," imbuhnya.

Fasilitasi Kolaborasi Solusi Digital Lewat G20 DIN

Dalam gelaran the 4th Meeting Digital Economy Working Group (DEWG), Presidensi G20 Indonesia menggelar G20 Digital Innovation Network (DIN) sebagai side event rangkaian pertemuan DEWG. G20 Digital Innovation Network (DIN) menjadi forum untuk menggalang kesepakatan komersial dan kolaborasi inovasi digital.

Melalui G20 DIN tersebut, delegasi anggota G20 dan undangan akan mengambil bagian dalam memecahkan masalah inovasi dan teknologi paling mendesak di dunia setelah pandemi. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak delegasi negara anggota G20 mengoptimalkan forum itu untuk pemulihan ekonomi global.

“Mari kita bersama-sama terus memperkuat sinergi, mewujudkan pemulihan global yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan melalui transformasi digital. Recover Together, Recover Stronger,” ajaknya dalam sambutan pembukaan G20 DIN yang berlangsung secara hibrida dari The Westin Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (03/09/2022).

Pemulihan ekonomi pascapandemi akan berlangsung dengan baik jika didukung oleh infrastruktur digital yang berkelanjutan dan aman. Menurut Menkominfo, kedua hasil itu menjadi prasyarat untuk menyediakan layanan publik digital yang terjangkau, seraya menyontohkan pengalaman Indonesia.





"Ini akan memajukan pertumbuhan inovasi digital. Pada tahun 2021 yang lalu, nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai USD70 Miliar dan terus tumbuh berkembang hingga USD315,5 Miliar pada tahun 2030. (Itu) yang menghadirkan potensi bagi masa depan ekonomi Indonesia," tuturnya.

Menteri Johnny menjelaskan Indonesia telah berhasil menyumbangkan total dua decacorn dan empat belas unicorn startup dalam lima tahun terakhir. Hal itu menunjukkan bahwa startup kembali meletakkan fondasi yang kuat dari lintasan yang menjanjikan dari jalur pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

"Besarnya potensi ekonomi digital Indonesia ini memotivasi Presidensi G20 Indonesia untuk mengusung G20 DIN sebagai side event dari rangkaian pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG), yang mengusung tema The Rise of Digital Economy: Post-Pandemic Recovery and Beyond," jelasnya.

Potensi tersebut dilatari adanya kemampuan Indonesia mencatatkan startup homegrown yang

berkinerja tinggi. "Saat ini Indonesia mencermati bagaimana ekonomi digital Indonesia terus berkembang. Pada tahun 2018, Studi dari Bain memperkirakan pada tahun 2024, kawasan ASEAN akan melahirkan setidaknya 10 (sepuluh) perusahaan teknologi unicorn baru," ungkapnya.

Menteri Johnny meyakini fasilitasi pertemuan pelaku inovasi dari lembaga pemerintah, swasta, startup digital, dan korporasi akan meningkatkan kolaborasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi digital global.

"Kami percaya penyelenggaraan acara ini akan menjadi katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi digital, melalui memperkaya kolaborasi antara startup, venture capital, dan korporasi di skala nasional dan internasional," ungkapnya.

G20 DIN menjadi forum yang mempertemukan para pelaku industri dan inovasi mancanegara untuk saling berkolaborasi showcasing berbagai solusi inovatif dari startup di 5 sektor prioritas yaitu Kesehatan, Energi Terbarukan, Pendidikan dan Teknologi, Keuangan Inklusif, dan Rantai Pasok (Supply Chain).

Selain itu menjadi forum pertukaran pengalaman dan pengetahuan inovasi solutif yang mendukung pemulihan pascapandemi Covid-19, G20 DIN menjadi sarana berjejaring bagi pelaku industri dari berbagai negara serta membuka peluang kolaborasi dan momentum bisnis.



Kami percaya penyelenggaraan acara ini akan menjadi katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi digital, melalui memperkaya kolaborasi antara startup, venture capital, dan korporasi di skala nasional dan internasional

Perkuat Sinergi Transformasi Digital

Transformasi dan inovasi digital berperan penting dalam merespons pandemi global Covid-19, khususnya mempercepat pemulihan pascapandemi, terutama dalam mendukung usaha mikro dan perusahaan rintisan (startup). Selaras dengan laju inovasi digital, data Bank Dunia 2022 menyatakan, valuasi ekonomi digital mencapai 15,5 persen dari total produk domestik bruto (PDB) global. Atau, tumbuh 2,5 kali lebih cepat dibandingkan 15 tahun terakhir.

“Pada 2030, diperkirakan 70 persen dari penciptaan nilai baru dalam perekonomian akan didasarkan pada model bisnis yang dijalankan secara digital. Hal ini menunjukkan bagaimana inovasi digital telah dan akan terus memainkan peran penting dalam mendorong ekonomi masa depan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, saat membuka Digital Innovation Network (DIN) G20 yang berlangsung secara hibrida dari Nusa Dua, Bali, Sabtu (3/9/2022).

Peserta pertemuan G20 DIN didominasi pelaku bisnis sektor perawatan kesehatan (healthcare) dan energi terbarukan (renewable energy). Sedangkan peserta startup yang hadir rata-rata berada pada tahap pendanaan Seri A atau yang memiliki valuasi sekitar USD15 juta--USD20 juta (sekitar Rp220 miliar--Rp290 miliar).

“Venture capital yang turut terlibat juga memiliki struktur portofolio pendanaan yang kuat di negaranya masing-masing, untuk mendukung proses pendanaan startup secara lintas negara,” ujar Menkominfo.

Pada kesempatan tersebut, Menkominfo mengajak para peserta DIN G20 memperkuat sinergi pemulihan global melalui transformasi digital. Sesuai dengan motto Presidensi G20 Indonesia 2022, “Pulih Bersama, Kuat Bersama”.

Kegiatan G20 DIN yang digelar pada 2 s.d. 4 September 2022 merupakan salah satu side event rangkaian pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) G20. Dikatakan Menteri Johnny, puncak dari DEWG G20 melalui Digital Minister Meeting pada 1 September 2022 juga mendukung penuh



peran inovasi digital dalam pertumbuhan ekosistem startup nasional dan internasional.

Topik ini telah menjadi isu prioritas DEWG pertama hingga keempat, yakni konektivitas dan pemulihan pasca-Covid-19. Negara-negara G20 mengakui, konektivitas yang tangguh dan berkualitas tinggi sebagai elemen mendasar dalam memfasilitasi ekonomi digital yang inklusif, berpusat pada masyarakat, dan memberdayakan ekonomi digital yang mendukung inovasi startup.

Pihak Kementerian Kominfo sebagai pengampu DEWG G20 optimistis, ajang G20 DIN akan bisa memfasilitasi pertemuan, penyampaian ide, dan diskusi yang akan menghasilkan kesepakatan komersial dan kolaborasi dalam inovasi digital.



Tantangan Industri Digital

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menambahkan, forum G20 DIN akan menjadi wahana untuk mengingatkan dan memberikan pencerahan mengenai tantangan industri digital yang akan dihadapi pascapandemi.

Caranya dengan menghadirkan lima startup dari negara anggota G20 dan tamu undangan untuk menampilkan inovasi yang telah diterapkan di pasar mereka. Oleh karena itu, DIN G20 menyediakan pitching session yang menampilkan lima startup dari setiap sektor, yakni kesehatan, teknologi pendidikan, rantai pasok, energi hijau, dan energi terbarukan.

Pada tahun ini ada lima startup dalam negeri yang tersaring untuk mengikuti G20 DIN. Kelima startup

tersebut itu adalah, Cakap, Komunal, Nusantics, Sinbad, serta Xurya. Dirjen Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, kelima startup yang lolos mengikuti G20 Digital Innovation Network telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Sejumlah aspek penilaiannya, antara lain, kesiapan startup untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas hingga go international, produk yang dihasilkan sudah mature serta memiliki pangsa pasar yang jelas.

“Saya yakin, hadirnya berbagai pemain kunci inovasi dalam forum ini akan memberikan kita ide dan inovasi baru yang akan mendorong terobosan-terobosan di masa depan,” tukas Samuel.



Jadikan Startup Digital Nasional Naik Kelas

G20 Digital Innovation Network (DIN) diharapkan dapat menjadi ajang inovasi dan kreativitas startup digital di Indonesia terus bertumbuh agar bisa naik kelas.

"Kegiatan G20 Digital Innovation Network ini untuk memperjumpakan antara ide-ide kreatif startup Indonesia dengan venture capital asal bisa berkembang dan nanti bisa naik kelas, kita berharap nanti akan muncul unicorn-unicorn yang baru," tuturnya dalam Konferensi Pers G20 DIN di Hotel Westin Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (03/09/2022).

Menteri Johnny menyatakan tumbuhnya startup unicorn baru menjadi peluang menghasilkan tambahan decacorn dengan berbagai cara, baik melalui merger akuisisi maupun pelebaran pasar yang meningkat dengan baik.

"Meningkat proyeksi digital ekonomi Indonesia di tahun 2030 sekitar 315 setengah Miliar Dollar,

hampir setara dengan 42 persen digital economy di ASEAN, jadi begitu besar. Maka perlu kita siapkan dan bekerja bergandengan tangan bersama-sama," jelasnya.

Menurut Menkominfo, Pemerintah telah dan akan terus mengambil bagian penting di semua lini untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, termasuk dengan mengembangkan inovasi startup.

"Mulai dari pembangunan infrastruktur digital secara besar-besaran di hulu, pelatihan-pelatihan terhadap sumberdaya manusia digital di semua lini baik tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut," jelasnya.

Pemerintah juga menyiapkan SDM untuk tata kelola spektrum frekuensi yang memungkinkan operator seluler dapat mengembangkan usaha dan membangun jaringan yang lebih luas untuk menjangkau seluruh wilayah tanah air.

"Dan tentunya, menyiapkan regulasi-regulasi yang

dibutuhkan agar konvergensi dan playing field di bidang usaha telekomunikasi dan digital bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik," ujarnya.

Rangkaian kegiatan G20 Digital Innovation Network melibatkan 400 partisipan dari 42 venture capital, 55 startup serta sejumlah policymakers, pembuat kebijakan bidang digital dan korporasi yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual.

"Dengan hadirnya 55 startup dan 42 VC, kami berharap Anda semua dapat menggali potensi kolaborasi dan investasi dari pertemuan yang terdiri dari beberapa sesi mulai dari pembicara utama, diskusi panel, pertemuan bisnis 1-on-1, hingga startup pitching," jelas Dirjen Aptika Samuel Pangerapan.

Indonesia juga akan menerbitkan Buku Putih Elektronik (White e-Book) yang memberikan gambaran tentang perjalanan G20 DIN.

"White e-Book itu berisikan mengenai ringkasan penjelasan dari pemaparan pembicara utama, diskusi panel, wawasan masing-masing sektor utama, serta 10 startup yang menerima Penghargaan Startup Inovatif," jelasnya.

Lima Startup Indonesia Berjaya

Dalam Closing Digital Innovation Network, terdapat sepuluh startup yang menerima penghargaan inovasi dengan lima sektor utama yakni Health, Supply Chain, Green & Renewable Energy, Edutech, dan Fintech. Terdapat lima perusahaan rintisan Indonesia yang turut berhasil merebut penghargaan dari sektor utama DIN, yaitu Sinbad, Xurya, Nusantic, Cakap, dan Komunal.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel A. Pangerapan meyakini penghargaan itu akan mempercepat pertumbuhan kelima startup dan memacu semangat bersaing di kancah internasional.

"Penghargaan ini membangun kepercayaan diri startup kita. Ternyata mereka menang saat berkompetisi dengan startup dari negara-negara yang lain. Itulah yang membuat mereka percaya diri untuk mempercepat pertumbuhan start-upnya," ungkapnya saat memberi penjelasan kepada

pekerja media usai acara Closing Digital Innovation Network, di The Westin Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (04/09/2022)

Adapun startup digital yang menerima penghargaan berdasarkan penilaian dewan juri, sebagai berikut:

Healthcare

- UCARE.AI - 31 - Singapore - *In Person*
- Neurobots - 30 - Brazil - *In Person*

Supply Chain

- MOOVA (Virtual) - Argentina
- Sinbad (*In person*) - Indonesia

Green & Renewable Energy

- Xurya (*In Person*) - Indonesia
- Uali (*In Person*) - Argentina

Edutech

- Edubuk (*In Person*) - India
- Accredify (*In Person*) - Singapore

Fintech

- WireBarley (Virtual) - Republic of Korea
- Lendo (Virtual) - Saudi Arabia

Sedangkan perusahaan rintisan yang merebut penghargaan kategori unggulan, antara lain:

Healthcare

- NUSANTIC - Indonesia
- Qapsula - Rusia

Supply Chain

- Eunimart - India - Virtual
- FairSupply - Australia

Green & Renewable Energy

- EINHUNDERT Energie GmbH - Germany - (virtual)
- MVL Labs - RoK

Edutech

- Cakap - Indonesia - *In Person* - Education Technology
- Sarente Gameon - Turkiye

Fintech

- Komunal - Indonesia
- Lendo - Saudi Arabia

Serahkan ke India, Indonesia Harapkan G20 DIN Berlanjut

Pemerintah Republik Indonesia menginisiasi G20 Digital Innovation Network G20 dengan menyempurnakan G20 Innovation League dalam Presidensi G20 Italia tahun 2021. Melalui G20 DIN, Presidensi Indonesia memfasilitasi multistakeholder saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan ide berkaitan dengan digitalisasi.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel A. Pangerapan menyatakan Presidensi G20 Indonesia menyerahkan G20 DIN secara simbolis kepada India yang akan menjadi tuan rumah pertemuan G20 pada tahun 2023.

"Acara ini adalah kelanjutan dari Presidensi G20 Italia yaitu Digital Innovation League. Kita mengubah atau meng-alternate yang membuat lebih baik dengan hanya pertandingan saja, tetapi bagaimana membangun jaringan (networking) dan berkolaborasi," ujarnya saat menyerahkan secara simbolis G20 Digital Innovation Network lewat Handover Ceremony, di The Westin Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (04/09/2022) sore.

Dirjen Samuel menyatakan harapan Presidensi G20 Indonesia untuk melanjutkan G20 DIN. Pemerintah Indonesia masih merencanakan nama penyelenggaraan Presidensi G20 berikutnya untuk dapat memperluas sektor perusahaan startup yang berpartisipasi.

"Harapannya, acara yang sama akan dilanjutkan oleh Presidensi G20 India. Semoga akan ada kelanjutan dari semua upaya kami selama penyelenggaraan acara yang telah berlangsung mulai 2 hingga 4 September, hari ini, pada Presidensi mendatang," ungkapnya

Menurut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, jika Presidensi G20 India tidak melanjutkan maka Indonesia akan mengubah penamaan acara itu yang masih akan dimatangkan. Dengan prinsip mentransformasikan kegiatan bisnis ke era digital.

"Apabila India melanjutkan, kami akan mengubah nama. Di tahun depan, mungkin nama Digital Innovation Network akan berbeda karena itu sudah melekat pada penyelenggaraan G20," jelasnya.



Harapannya, acara yang sama akan dilanjutkan oleh Presidensi G20 India. Semoga akan ada kelanjutan dari semua upaya kami selama penyelenggaraan acara yang telah berlangsung mulai 2 hingga 4 September, hari ini, pada Presidensi mendatang

SELAMAT HARI BHAKTI POSTEL

27 September 2022

Maju Bersama Pos dan Telematika
Menuju Indonesia Sejahtera



Wajah Baru Pos Lintas Batas Negara dalam Prangko

Oleh: Eko Wahyunto; Analis Kebijakan Ahli
Madya Kementerian Kominfo

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki perbatasan darat internasional dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara yakni: India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Dengan posisi seperti itu, Indonesia bisa disebut sebagai “koridor strategis” bagi perlintasan orang dan barang dari berbagai penjuru dunia.

Indonesia terdiri dari gugusan kepulauan dengan wilayah perairan sebagai “kompartemen” yang tidak dapat dipisahkan, dilindungi batas wilayah negara berdasar status hukum internasional yang sah. Secara fungsional batas antarnegara terdiri dari kawasan yang tak terpisahkan, berdampingan atau berhadapan dengan kedaulatan, hukum, atau yurisdiksi yang berbeda. Batas-batas wilayah tersebut diperlukan untuk merumuskan hak dan kewajiban setiap negara berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Hal yang sulit dihindarkan adalah potensi munculnya sengketa perbatasan antarnegara akibat perbedaan pandangan tentang batas-batas dimaksud. Setiap terjadi sengketa diselesaikan melalui lembaga arbitrase, ataupun mahkamah internasional, sehingga lahir putusan-putusan lembaga peradilan baru berdasar prinsip-prinsip keadilan untuk dikukuhkan kembali oleh Konvensi Multilateral.

Guna menjaga teritorial Indonesia terutama di wilayah perbatasan, Pemerintah sudah dan tengah

melakukan revitalisasi Pos Lintas Batas Negara - PLBN dengan membangun gerbang perlintasan di beberapa titik strategis. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, daerah perbatasan Indonesia telah memiliki wajah baru.

Untuk mendokumentasikan sekaligus menyosialisasikan keberadaan pos lintas batas tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerjasama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menerbitkan tiga prangko seri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Skouw di Provinsi Papua. Penerbitan prangko Pos Lintas Batas akan diterbitkan bersamaan dengan hari ulang tahun BNPP tanggal 17 September. Ketiga prangko tersebut antara lain:

1. Prangko PLBN Aruk



PLBN Aruk yang berada di Kabupaten Sambas diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 17 Maret 2017. Presiden RI mengakui bahwa dari seluruh PLBN di Kalbar yang telah dikunjungi, PLBN Aruk adalah yang terbaik. Pada saat itu, Presiden RI berpesan agar PLBN Aruk digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Wilayah PLBN Aruk terbagi dua, yaitu PLBN Terpadu Aruk dan Terminal Barang Internasional Aruk. PLBN Terpadu Aruk seluas 26,2 Ha, sementara Terminal Barang Internasional Aruk seluas 2,2 Ha yang saat ini masih dalam proses pembangunan. PLBN Terpadu Aruk mempunyai gedung pelayanan kepabeanan, imigrasi,

karantina hewan, dan lain-lain. Di samping itu, PLBN Terpadu Aruk juga dilengkapi dengan Wisma Indonesia yang mempunyai luas 4.250 m² dengan 58 kamar tidur dan aula pertemuan yang dapat memuat 1.000 orang, gereja dan masjid, pasar, serta lahan parkir.

Selama tahun 2019, PLBN Aruk telah melayani arus masuk orang sebanyak 103.797 orang dimana sekitar 88% dari jumlah tersebut merupakan WNI. Sementara arus keluar orang sebanyak 117.417 orang dengan WNI sebanyak 90%. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa yang paling banyak menggunakan PLBN untuk keluar masuk Indonesia - Malaysia.

Bentuk bangunan inti PLBN Aruk mengadopsi arsitektur rumah adat tradisional dan ornamennya mengadopsi corak ukiran tradisional masyarakat lokal. Konsep atas bangunan PLBN Aruk ditransformasi dari bentuk Rumah Panjang dan Perisai khas Dayak. Perisai melambangkan bagian pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi, sedangkan corak dan warna mengaplikasikan kombinasi etnik-moderen yang diterapkan pada bagian elemen dinding dan relief pada bagian pintu gerbang, termasuk atapnya tinggi dengan ukiran tradisional Dayak.

2. Prangko PLBN SKOW

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw menggunakan desain bangunan Rumah Tangfa, Bentuk dan Warna Tifa, Motif Suku Lokal yang merupakan ciri rumah di daerah Skouw dan Sota. Rumah tersebut memiliki atap



dengan bentukan perisai dan memiliki 2 (dua) ruang panjang untuk masyarakat berkumpul, sedangkan bagian tengah berfungsi sebagai sirkulasi.

PLBN Skouw menjadi tempat terpadunya pemeriksaan imigrasi, bea cukai, karantina pertanian dan ikan, serta karantina kesehatan bagi pelintas batas dari Indonesia ke Papua New Guinea maupun sebaliknya.

Selain layanan pelintas batas, juga dilengkapi fasilitas seperti gedung serbaguna, klinik, amphitheater, pasar perbatasan, rumah ibadah, wisma Indonesia, mess pegawai, rumah ibadah, serta beberapa fasilitas layanan publik hingga ruang terbuka hijau.

luas 8,5 Ha ini pada 28 Desember 2016. PLBN Motaain terhubung dengan Pintu Perbatasan Batugade di Timor Leste.

Bentuk bangunan PLBN Motaain mengadopsi arsitektur rumah adat tradisional dan ornamennya mengadopsi corak ukiran tradisional masyarakat NTT. PLBN Motaain mengadopsi atap tradisional Rumah Matabesi yang merupakan rumah adat masyarakat Belu. Sedangkan ornamen sun shading digunakan pada atap bangunan pemeriksaan kendaraan pribadi mengadopsi corak tenun setempat.

PLBN Motaain menjadi tempat terpadunya pemeriksaan imigrasi, bea cukai, karantina pertanian dan ikan, serta karantina kesehatan bagi pelintas batas dari Indonesia ke Timor Leste maupun sebaliknya.

BNPP sendiri menyambut baik rencana penerbitan prangko seri tiga PLBN tersebut, oleh karena ketiga lokasi PLBN saat ini sedang difokuskan Presiden Joko Widodo sebagai lokasi percepatan pembangunan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Prangko seri Pos Lintas Batas Negara - PLBN bergambar, tiga gerbang PLBN yakni PLBN Aruk, PLBN Motaain, dan PLBN Skouw, dengan latar Sampul Hari Pertama - SHP berupa gambar PLBN Entikong dalam kemasan souvenir sheet, direncanakan sejak tahun lalu. Kemudian pada Tahun 2022 Kominfo menggandeng BNPP dan PLBN, bersama Pokjanas Prangko menyelesaikan proses produksi prangko tersebut, mulai dari pemilihan desain, pengambilan gambar di lapangan, penyelesaian HAKI, cetak coba hingga masuk pada fase cetak secara massal.

Prangko PLBN merupakan salah satu tema prangko dari 13 prangko yang diterbitkan oleh Pemerintah tahun ini. Program ini selain untuk mendokumentasikan sejarah wilayah perbatasan Indonesia sebagai "penjaga beranda depan



3. Prangko PLBN Motaain

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, merupakan bangunan representasi, simbol, dan kinerja pengelolaan perbatasan negara yang dibangun di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. PLBN Motaain berjarak 296 Km dari Kota Kupang, namun dapat di jangkau dengan penerbangan udara kurang lebih 50 menit dari Kupang ke Atambua, Kabupaten Belu, dan dilanjutkan perjalanan darat kurang lebih 21 Km dengan jarak tempuh 45 sampai dengan 60 menit dari Kota Atambua.

PLBN Motaain dibangun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu dan Sarana Praarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Presiden Joko Widodo meresmikan PLBN Motaain yang memiliki

NKRI” juga untuk menunjukkan betapa perhatian pemerintah dalam membangun perbatasan negara yang patut dibanggakan. Atas dasar itulah, Kemkominfo ingin memberikan penghargaan sekaligus mencatatkan tempat monumental tersebut menjadi prangko.

“Kenapa dalam prangko? karena prangko selain menjadi alat bayar dalam pengiriman surat dan barang, juga menjadi dokumen penting yang dicatatkan di badan internasional Universal Post Union - UPU yang beranggotakan 192 negara, dengan demikian pos lintas batas Indonesia itu dikenal diseluruh dunia. Oleh sebab itu prangko juga berfungsi sebagai “second trac diplomacy”.

Di berbagai kesempatan prangko digunakan oleh Kepala negara untuk saling tukar menukar souvenir, bahkan bukan itu saja beberapa negara seperti Cina, Korea, Selatan, Jepang Amerika, Dan beberapa negara lain memilih prangko untuk menandai peringatan hubungan bilateral dengan berbagai negara dalam program Joint Issue of Stamp atau JIS.

Indonesia sendiri sudah beberapa kali melakukan penerbitan prangko bersama atau Joint Issue of Stamp atau JIS, dengan berbagai negara, untuk menandai peringatan hubungan bilateral antara kedua negara seperti dengan Jepang Amerika Cina Singapura Thailand Kolombia dan beberapa negara lain.

Kita tentu masih ingat ketika Malaysia memenangkan diplomasi di perserikatan bangsa-bangsa tentang konflik sipadan ligitan yang dibangun di lokasi tersebut bukan kantor pemerintahan atau pangkalan militer, melainkan Malaysia langsung membuat prangko tentang Sipadan Ligitan.

Peristiwa tersebut tidak boleh terulang lagi, oleh karena itu gagasan menerbitkan prangko seri PLBN salah satunya untuk tujuan “menjaga beranda depan NKRI” , karena fungsi prangko yang mampu membangun image dan GB menguatkan legitimasi titorial, sebagai bagian dari simbol-simbol penting negara.



<https://www.kominfo.go.id/content/detail/44353/wajah-baru-pos-lintas-batas-negara-dalam-prangko/0/artikel>

Selamat Hari Hak Untuk Tahu Sedunia

28 September 2022

Right to Know Day
Akses Informasi Tanpa Keterbatasan



Jamin Hak Warga Negara, Menteri Johnny: Indonesia Jadi Negara Kelima di ASEAN Miliki Aturan Data Pribadi



Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP). Selanjutnya RUU PDP tersebut akan disampaikan DPR kepada Presiden untuk disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara.

Mewakili Presiden RI Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Indonesia menjadi negara kelima di ASEAN yang memiliki payung hukum pelindungan data pribadi secara komprehensif.

Menteri Johnny menegaskan keberadaan UU PDP akan menjamin hak warga negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Pengesahan RUU PDP merupakan wujud nyata dari pengejawantahan amanat UUD, khususnya Pasal 28 G ayat (1),” tegasnya saat menyampaikan Pendapat Akhir Presiden RI atas RUU PDP dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPRI RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/09/2022).

Menkominfo menyatakan dari sisi kenegaraan dan pemerintahan, UU PDP merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara di ranah digital.

“Lebih dari itu, RUU PDP akan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan dan mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi, (baik publik maupun privat),” jelasnya.

Menteri Johnny menegaskan keberadaan UU PDP akan menjadi payung hukum Pelindungan Data Pribadi yang lebih komprehensif, memadai, dan berorientasi ke depan.

"UU PDP juga memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban Pengendali Data Pribadi di mata hukum," tegasnya.

Menkominfo menyatakan pengesahan UU PDP akan dapat memperkuat kepercayaan (*trust*) dan rekognisi terhadap kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola data global. Menurutnya Indonesia juga akan menjadi negara kelima di ASEAN yang memiliki payung hukum Pelindungan Data Pribadi yang komprehensif.

"Hal ini sejalan dengan upaya-upaya Indonesia dalam G20 yang menginisiasi pengadopsian 3 (tiga) prinsip dalam data *free flow with trust* (DFFT) dan *cross border data flows* (CBDF) yaitu *lawfulness* (keabsahan/sah secara hukum), *fairness* (adil/sesuai tujuan pemrosesan), dan *transparency* (transparan) dalam G20 Digital Economy Working Group (DEWG)," jelasnya.

Menteri Johnny mengapresiasi upaya Anggota DPR RI dalam proses pengesahan UU PDP. Menurutnya pengambilan keputusan atas RUU PDP merupakan momentum bersejarah dan telah dinantikan banyak

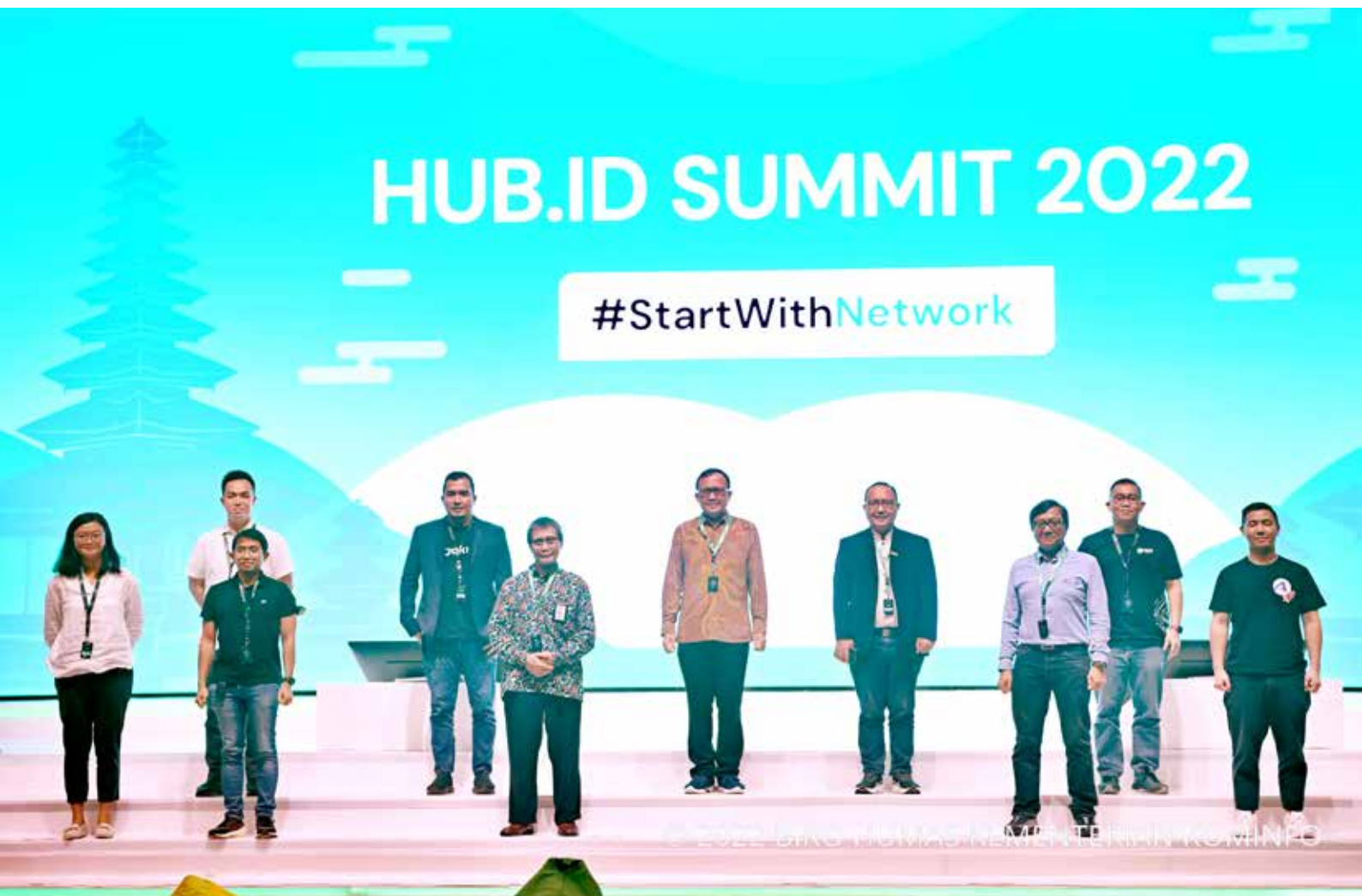
pihak. Baik itu, lembaga negara, penegak hukum, sektor usaha, ekosistem digital, platform dan media sosial, serta masyarakat Indonesia.

"Pemerintah dan DPR RI telah bahu-membahu dalam menyelesaikan pembahasan RUU PDP, baik pada rapat kerja, rapat panitia kerja (Panja), maupun pada rapat tim perumus dan tim sinkronisasi (Timus dan Timsin) antara Pemerintah dan DPR RI," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan RUU PDP kepada Ketua DPR RI melalui surat Presiden pada tanggal 24 Januari 2020 yang lalu. Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Dalam Negeri, mewakili Presiden dalam pembahasan RUU PDP di DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama.

Sejak saat itu pula, Pemerintah dan DPR RI telah bersama-sama saling membantu dalam menyelesaikan pembahasan RUU PDP. Pada 7 September 2022 lalu, Pemerintah dan Komisi I DPR RI telah menyetujui naskah RUU PDP yang sudah disepakati untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II/Sidang Paripurna. Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui naskah RUU PDP.





Dorong Jadi Raksasa Teknologi, Kominfo Fasilitasi Startup Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mendorong pengembangan startup digital nasional. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo Samuel A. Pangerapan menyatakan sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator, Kementerian Kominfo mendorong startup digital menjadi raksasa teknologi.

“Salah satu peran dari Kominfo adalah untuk memberdayakan dan memfasilitasi para pendiri startup teknologi Indonesia melalui kewirausahaan

yang ada, Kami percaya, mereka memiliki potensi menjadi raksasa teknologi,” ujarnya saat memberi sambutan dalam HUB.ID Summit melalui tayangan video, di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (05/09/2022).

Lewat HUB.ID Summit 2022, Kementerian Kominfo menghubungkan *startup early-stage*, pemodal ventura, dan mitra bisnis untuk menjajaki potensi kolaborasi serta investasi.

Dirjen Samuel menyatakan, melalui kolaborasi dan investasi yang baik, ia yakin ekosistem startup teknologi Indonesia akan tangguh dalam menghadapi setiap tantangan ke depan.

"Kurator kami telah memilih 80 Startup dari berbagai sektor seperti Enterprise and Government Technology, Agritech, Healthtech, Social Commerce and SME Enabler, Web 3.0, dan masih banyak lagi," jelasnya.

Menurut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, kearifan lokal bisa menjadi kekuatan perusahaan rintisan atau startup di tanah air agar lebih banyak menggaet investor.

"Dengan kombinasi pasar yang menguntungkan dan *startup* teknologi yang berakar pada kearifan lokal, kami optimis bahwa *startup* digital di Indonesia bisa menggaet investor untuk berkolaborasi," ungkapnya.

Dirjen Samuel mendorong pemodal ventura dan mitra bisnis yang telah berkumpul di Nusa Dua, Bali, untuk terhubung dengan startup pilihan.

"Atas nama Pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh delegasi dan perwakilan atas waktunya menghadiri HUB.ID Summit 2022," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyampaikan optimisme tinggi atas perkembangan ekonomi digital Indonesia. Selain pasar yang besar, pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan peningkatan drastis digitalisasi ekonomi di Indonesia.

"Lebih dari 210 juta orang Indonesia merupakan pengguna internet aktif dan aktivitas mereka akan memberikan kontribusi USD70 Miliar terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2021," ungkapnya.

Menurut Dirjen Samuel, ekonomi berbasis internet Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih besar lagi, nilainya diperkirakan akan mencapai lebih dari USD146 Miliar pada tahun 2025 mendatang. "Untuk itu Pemerintah Indonesia mendorong pertumbuhan ini untuk mempercepat pemulihan pascapandemi Covid-19," ujar Dirjen Samuel.



© 2022 BIRO HUMAS KEMENTERIAN KOMINFO

Menkominfo Jajaki Potensi Kerja Sama Penggunaan Jaringan Kabel Serat Optik



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menjajaki peluang kerja sama penggunaan jaringan kabel serat optik Portugal di Laut Atlantik agar bisa menghubungkan dengan jaringan telekomunikasi Pantai Barat Amerika. Menurutnya penggunaan jaringan infrastruktur telekomunikasi itu akan meningkatkan efisiensi dalam menghubungkan jaringan telekomunikasi nasional ke global.

“Jika Indonesia bisa menggunakan infrastruktur Portugal ini, khususnya transmisi data melalui fiber optik, maka itu akan bisa lebih efisien. Di ujungnya Portugal, jaringan *fiber optic* lintas Atlantik itu langsung tersambung dengan New York. Lalu lintas ini yang sedang kita bahas kerja samanya,” jelasnya usai bertemu dengan Sekretaris Negara Bidang Digitalisasi dan Modernisasi Administrasi Portugal Mario Campolargo di Kantor Kepresidenan Dewan Menteri/Departemen Pemerintah Pusat Portugal, di Lisbon, Portugal, Jumat (24/09/2022) malam waktu setempat.

Menkominfo menyatakan saat ini, Indonesia tengah membangun jaringan kabel serat optik untuk menghubungkan jaringan nasional menuju Pantai Barat Amerika melalui Samudera Pasifik.

“Kalau kita ke Inggris, tersambung ke Utara. Lalu, kalau kita ke Perancis, masih jauh di Timur. Kalau langsung sambung jaringan ke Portugal, maka bisa terhubung dengan Pantai Barat Amerika yang menghubungkan dan lebih efisien,” tandasnya.

Menurut Menteri Johnny, Portugal mempunyai jaringan kabel serat optik yang luar biasa yang menghubungkan Uni Eropa dengan Afrika, Uni Eropa dengan Mediterania, Uni Eropa dengan Pantai Timur Amerika Serikat, Uni Eropa dengan Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

“Posisi geografis Portugal yang sangat strategis, berada di ujung barat Eropa, persis di tepi Samudra Atlantik dan berbatasan langsung dengan benua Afrika. Jaringan *fiber optic* global ini perlu juga kita punya hubungan, misalnya data yang dikirim ke Amerika Serikat melalui jalur *fiber optic* yang mana? Pasti saat ini melalui Timur Tengah - Eropa, dan untuk lintas Atlantik menuju Pantai Timur Amerika, kita perlu membangun jaringannya. Di situ Portugal mempunyai jaringan yang bisa kita kerjakan bersama-sama,” jelasnya.

Guna memperkuat konektivitas global, Indonesia tengah menyiapkan dua jalur, melalui Lautan Pasifik ke Pantai Barat Amerika, dan jalur melalui

Eropa Lintas Atlantik ke Pantai Timur Amerika, di New York dan Washington DC. Dua jalur itu diperlukan untuk redundancy jaringan transmisi data Indonesia dengan Amerika Serikat.

“Indonesia juga sedang menyiapkan jaringan *fiber optic* dari Indonesia yang dihubungkan dengan California, Pantai Barat Amerika. Itulah kerja sama dengan Portugal,” ungkap Menkominfo.

Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny dan Sekretaris Negara Mario Campolargo mendiskusikan banyak hal di sektor digital. Menkominfo menyatakan jika kerja sama itu bisa berlanjut akan dapat memperlancar dan mempermudah komunikasi secara global. Belum lagi, pembiayaan konektivitas akan makin efisien dari aspek biaya.

“Peluang kemitraan ini nantinya akan ditindaklanjuti kepada operator kedua negara. Ini masalahnya adalah masalah efisiensi. Tadi diskusi kita, setelah sama-sama paham di tingkat menteri perlu ditindaklanjuti langsung ke operatornya, karena kalau kerja sama fiber optik itu dengan operator *fiber optic* di Indonesia dan Portugal, nanti akan ditindaklanjuti,” tandasnya.

Dalam kunjungan kerja ke Portugal, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, serta Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif.





Pagu Alokasi Anggaran Meningkat, Menteri Johnny Tekankan Tata Kelola yang Efektif dan Prudent

Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dari tahun ke tahun meningkat. Seiring dengan kenaikan alokasi itu, tren realisasi anggaran dari 2018 hingga 2021 dan perkiraan 2022 terus mengalami peningkatan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan telah menerapkan tata kelola anggaran yang efektif dan prudent.

"Tren realisasi anggaran dari 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Dalam pelaksanaan program-program, Kementerian Kominfo terus mengupayakan tata kelola anggaran yang efektif dan tentu selalu prudent," jelasnya dalam Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (07/09/2022).

Menurut Menteri Johnny, Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Kominfo dari tahun ke tahun yang terus meningkat diantaranya terdiri dari Pagu Alokasi Anggaran tahun 2018 sebesar 5,164 triliun dengan realisasi saat itu sebesar 94,8%.

“Pada tahun 2019 sebesar Rp.6,671 Triliun dengan realisasi saat itu sebesar 97,4%, pada tahun 2020 sebesar Rp.8,094 Triliun dengan realisasi sebesar 98,2%, pada tahun 2021 meningkat sangat tajam sebesar 24,139 triliun dengan realisasi saat itu sebesar 96,99%,” paparnya.

Untuk tahun 2022, Menkominfo menyatakan Pagu Anggaran Kementerian Kominfo menjadi Rp.26,278 triliun. Kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Johnny menyatakan harapan agar realisasi anggaran akan mengalami peningkatan.

“Dengan prognosis realisasi di akhir tahun sebesar 93,15%, mudah-mudahan bisa lebih tinggi realisasinya nanti,” ungkapnya.



Rapat kerja dengan Komisi I DPR RI mengagendakan pembahasan Rencana Kerja Anggaran atau RKA Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023, serta isu-isu aktual bidang komunikasi dan informatika.

Dalam Rapat Kerja, Menteri Johnny didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Inspektur Jenderal Doddy Setiadi, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, serta jajaran staf khusus Menteri Kominfo.

Hadir pula pimpinan tiga lembaga Kuasi antara lain Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, dan Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra.





#BertemanAman

Program literasi digital yang mengajak pemuda Indonesia menjadi penggiat literasi digital

Menjadikan Indonesia Lebih Mampu Secara Digital

- Mengintensifkan penetrasi literasi digital di keluarga dan komunitas di Indonesia
- Memberikan literasi digital di masa transformasi digital yang pesat di Indonesia
- Mendidik generasi muda tentang privasi dan keamanan